PENDAMPINGAN SOSIAL TERHADAP KLIEN TUNAWISMA SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN FUNGSI SOSIAL DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

Muhammad Hirzi Zhafari¹, Fajar Utama Ritonga², Agus Suriadi

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Kota Medan, Indonesia

Email : mhirzi@students.usu.ac.id

fajar.utama@usu.ac.id

agus4@usu.ac.id

ABSTRAK

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kota Binjai bidang Rehabilitasi Sosial memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal peran pekerja sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya tunawisma. Tulisan ini merupakan laporan berbasis klien berjenis kelamin laki-laki, yaitu Bapak R (45 tahun), yang hidup terlantar dan tidak memiliki tempat tinggal tetap serta dokumen kependudukan.

Kegiatan ini mencakup tahapan engagement, asesmen sosial, perencanaan intervensi, hingga simulasi rujukan layanan, dengan pendekatan case work dan model pemulihan berbasis kebutuhan dasar. Hasil menunjukkan bahwa klien membutuhkan penanganan cepat berupa tempat tinggal sementara, akses makan harian, dan dokumen resmi untuk masuk ke dalam DTKS. Refleksi ini menekankan pentingnya sinergi antara pekerja sosial, lembaga rehabilitasi, dan layanan kependudukan dalam memulihkan fungsi sosial klien tunawisma secara menyeluruh.

Kata Kunci : PKL, Rehabilitasi Sosial, Tunawisma, Pemulihan Sosial, Dinas Sosial

ABSTRACT

The Field Practice (PKL) at the Binjai City Social Service, particularly in the Social Rehabilitation Division, provides students with the opportunity to understand the role of social workers in assisting Individuals with Social Welfare Problems (PMKS), especially the homeless. This paper is based on a fictitious male client, Mr. R (45 years old), who lives on the streets without permanent residence or civil identity documents.

The activity includes stages of engagement, social assessment, intervention planning, and referral simulation, using a casework approach and basic needs-based recovery model. The simulation results indicate that the client requires immediate handling such as temporary shelter, daily food access, and official documentation to be included in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). This reflection emphasizes the importance of

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.KK.443

Prefix DOI :
10.9765/Krepa.V218.3784

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

collaboration between social workers, rehabilitation institutions, and civil registration services in restoring the social functioning of homeless individuals comprehensively.

Keywords: *Field Practice, Social Rehabilitation, Homeless, Social Recovery, Social Services*

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan keberadaan tunawisma atau gelandangan merupakan salah satu indikator nyata dari kemiskinan struktural dan ketimpangan distribusi layanan sosial di perkotaan. Kota-kota menengah seperti Binjai turut mengalami fenomena ini, seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan ketidakseimbangan antara kapasitas ekonomi keluarga dengan kebutuhan dasar yang terus bertambah. Tunawisma bukan hanya merepresentasikan keterlantaran fisik, tetapi juga mencerminkan keterputusan sosial individu dari sistem layanan dan dukungan masyarakat yang seharusnya menjadi jaring pengaman.

Fenomena tunawisma di perkotaan merupakan manifestasi nyata dari kemiskinan struktural dan ketimpangan akses layanan sosial (Wardhani & Kusuma, 2018). Tunawisma, dikenal sebagai salah satu bentuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), memerlukan intervensi komprehensif melalui rehabilitasi sosial sesuai UU No. 11/2009

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tunawisma dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan upaya sistematis melalui rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pada proses pemulihan fungsi sosial secara menyeluruh melalui intervensi pekerja sosial. Pendekatan ini melibatkan identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pemberdayaan klien, hingga evaluasi terhadap keberhasilan adaptasi sosial klien di masyarakat

Penelitian oleh Halim, Achdiani, dan Fatimah (2025) menunjukkan pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator dan advokat dalam menghubungkan tunawisma dengan layanan dasar, seperti program “housing first” yang terbukti efektif. Studi dari Medan (Siregar et al., 2024) memperkuat bahwa penyediaan rumah singgah sebagai bentuk intervensi lembaga sosial bekerja optimal jika didukung koordinasi lintas sektor (Dinsos, Satpol PP, Disdukcapil)

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kota Binjai, penulis dihadapkan pada berbagai data dan kasus yang menggambarkan realitas lapangan, termasuk bagaimana pekerja sosial menangani kasus keterlantaran laki-laki dewasa yang hidup di ruang-ruang publik tanpa dukungan sosial atau identitas kependudukan. Melalui tugas ini, penulis menyusun sebuah simulasi pendampingan berbasis klien dengan pendekatan asesmen sosial yang digunakan oleh pekerja sosial di lapangan.

Pendahuluan ini menjadi pijakan awal dalam memahami kompleksitas penanganan masalah tunawisma, sekaligus menggambarkan bagaimana intervensi sosial dalam konteks kelembagaan menjadi sangat penting untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem dan keterasingan sosial. Dengan mengintegrasikan pendekatan praktis dan reflektif, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana pemulihan fungsi sosial dapat dimulai dari tahap

yang paling sederhana: mengenali manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek intervensi kebijakan.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif berbasis praktek, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai proses penanganan klien tunawisma melalui tahapan intervensi pekerjaan sosial. Metode ini dipilih agar pelaksanaan kegiatan PKL bersifat reflektif, analitis, dan terstruktur.

TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 17, Kelurahan Berngam,
Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Maret 2025 - Juni 2025

METODE KEGIATAN

Metode kegiatan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini menggunakan pendekatan pekerjaan sosial individual (social casework) berdasarkan enam tahapan kerja sosial menurut Charles Zastrow, yaitu engagement, assessment, planning, intervention, evaluation, dan termination (Zastrow, 2010). Pendekatan ini digunakan untuk melakukan simulasi pendampingan terhadap seorang klien laki-laki, yaitu Bapak R (45 tahun), yang dikonstruksikan sebagai tunawisma tanpa dokumen kependudukan dan tinggal di ruang publik sekitar Kota Binjai.

1. Engagement (Menjalin Hubungan Awal)

Tahap awal ini dilakukan dengan membangun hubungan saling percaya antara pekerja sosial (diperankan mahasiswa) dan klien fiktif. Pendekatan dilakukan melalui komunikasi empatik dan penyusunan kontrak kerja profesional yang menggambarkan batasan, tujuan, dan ekspektasi dari proses pendampingan

2. Assessment (Assesmen Sosial)

Mahasiswa melakukan asesmen untuk menggali kondisi bio-psiko-sosial-spiritual klien secara menyeluruh. Informasi diperoleh melalui simulasi wawancara dan observasi fiktif yang disusun berdasarkan data nyata lapangan. Bapak R menceritakan bahwa ia berasal dari Tebing Tinggi dan kehilangan pekerjaan sebagai buruh bangunan akibat proyek dihentikan. Sejak itu, ia berpindah-pindah kota dan akhirnya tinggal di Binjai. Ia tidak memiliki KTP, KK, atau BPJS. Hubungan dengan keluarga terputus. Ia mengandalkan belas kasihan warga sekitar dan sesekali bekerja serabutan memulung.

3. Planning (Perencanaan Intervensi)

Berdasarkan hasil asesmen, saya menyusun rencana intervensi yang mencakup tiga fokus:

- Akses layanan dasar (pangan, tempat tinggal sementara)
- Pengelolaan dokumen kependudukan (KTP, KK)
- Rujukan ke lembaga rehabilitasi sosial mitra Dinas Sosial Kota Binjai

4. Intervention (Pelaksanaan Intervensi)

mahasiswa melakukan tahapan intervensi seperti penyuluhan, konseling singkat, serta koordinasi imajiner dengan pihak terkait (Disdukcapil, rumah singgah, LKS). Aktivitas ini diarahkan untuk melatih keterampilan advokasi sosial dan pemecahan masalah terstruktur.

5. Evaluation (Evaluasi)

Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas rencana intervensi yang dijalankan. Mahasiswa merefleksikan keberhasilan berdasarkan indikator, misalnya klien memiliki tempat tinggal sementara dan berhasil memperoleh KTP, serta adanya peningkatan motivasi sosial.

6. Termination (Terminasi)

Pada tahap akhir, hubungan profesional antara mahasiswa dan klien dihentikan dengan cara yang etis. Mahasiswa menyampaikan ringkasan proses pendampingan, serta membuat rekomendasi lanjutan agar klien tetap terhubung dengan lembaga sosial yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil PKL ini memperkuat beberapa konsep fundamental dalam pekerjaan sosial dan menyoroti tantangan serta peluang dalam penanganan tunawisma di perkotaan.

1. Urgensi Pendekatan Holistik dalam Penanganan Tunawisma

Kasus Bapak R menggarisbawahi bahwa tunawisma bukan sekadar masalah ketiadaan tempat tinggal, melainkan manifestasi dari kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan struktural. Keterputusan dari keluarga, kehilangan pekerjaan, dan ketiadaan dokumen kependudukan menciptakan lingkaran setan kerentanan. Pendekatan case work yang diterapkan, yang meliputi aspek bio-psiko-sosial-spiritual, menjadi krusial. Pemulihan fungsi sosial secara menyeluruh, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menuntut lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar. Ini melibatkan rekonstruksi identitas diri, reintegrasi sosial, dan penguatan kemandirian.

2. Peran Sentral Pekerja Sosial sebagai Fasilitator dan Advokat

secara jelas menggambarkan peran ganda pekerja sosial: sebagai fasilitator yang menghubungkan klien dengan sumber daya yang tersedia, dan sebagai advokat yang memperjuangkan hak-hak dasar klien. Dalam kasus Bapak R, advokasi untuk pengurusan dokumen kependudukan adalah contoh nyata bagaimana pekerja sosial dapat menjadi jembatan antara individu rentan dan birokrasi. Keberhasilan dalam memfasilitasi akses terhadap layanan dasar dan dokumen resmi adalah indikator penting keberhasilan intervensi.

3. Sinergi Multisektor: Kunci Efektivitas Rehabilitasi Sosial

Temuan dari ini selaras dengan literatur yang menunjukkan bahwa penanganan PMKS memerlukan koordinasi lintas sektor (Siregar et al., 2024). Keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta lembaga rehabilitasi sosial (LKS/rumah singgah) sangat esensial. Tanpa sinergi ini, upaya rehabilitasi akan terfragmentasi dan kurang efektif. Data Bapak R yang tidak memiliki KTP menegaskan bagaimana masalah administrasi kependudukan dapat menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara institusi-institusi ini menjadi prasyarat mutlak untuk pemulihan yang komprehensif.

4. Relevansi Model Pemulihan Berbasis Kebutuhan Dasar dan Pendekatan "Housing First"

Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan dan tempat tinggal sementara, adalah langkah awal yang strategis. Ini konsisten dengan filosofi "Housing First," di mana tempat tinggal yang stabil dipandang sebagai fondasi untuk mengatasi masalah lain seperti kesehatan mental, penyalahgunaan zat, atau masalah pekerjaan. Dengan menyediakan lingkungan yang aman dan stabil terlebih dahulu, individu seperti Bapak R akan lebih mampu untuk terlibat dalam proses rehabilitasi yang lebih mendalam dan membangun kembali kehidupannya.

5. Praktik Kerja Lapangan sebagai Wahana Refleksi dan Pengembangan Profesional

PKL ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga menjadi wahana refleksi kritis bagi mahasiswa. kasus realistik ini memungkinkan penulis untuk menginternalisasi teori-teori pekerjaan sosial, mengasah keterampilan praktis, dan memahami kompleksitas etika profesi. Refleksi ini menguatkan pemahaman bahwa penanganan tunawisma memerlukan empati mendalam, kesabaran, dan kemampuan untuk melihat individu sebagai subjek dengan hak dan potensi, bukan sekadar objek masalah.

KESIMPULAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kota Binjai melalui simulasi penanganan kasus tunawisma Bapak R, menunjukkan bahwa intervensi pekerjaan sosial individual (social casework) adalah pendekatan yang efektif dan esensial dalam memulihkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Proses ini, dari engagement hingga termination, membuktikan bahwa penanganan tunawisma membutuhkan fokus holistik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal sementara, tetapi juga secara krusial mengatasi masalah identitas dan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wardhani, I. H., & Kusuma, D. (2018). Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Akses Layanan Sosial di Perkotaan. *Jurnal Studi Pembangunan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (10th ed.).
- Halim, V., Achdiani, N., & Fatimah, I. (2025). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Tunawisma: Studi Kasus Program Housing First.
- Siregar, D., Utami, S. S., & Nasution, E. Y. (2024). Efektivitas Rumah Singgah dalam Reintegrasi Tunawisma: Studi Kasus di Kota Medan.
- Shinn, M., & Baumohl, J. (Eds.). (1999). *Homelessness in America*. National Coalition for the Homeless.